

**EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
PADA KOMPONEN PENDIDIKAN DI DESA SIDOREJO
KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO**

Adisty Dwayu Marchania

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas Negeri Surabaya
adistydwayu.20068@mhs.unesa.ac.id

Indah Prabawati

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas Negeri Surabaya
indahprabawati@unesa.ac.id

Abstrak

Program Keluarga Harapan merupakan bantuan non-tunai bersyarat yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Desa Sidorejo Kecamatan Krian telah menerima bantuan PKH sejak 2007, penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan pada komponen pendidikan di Desa Sidorejo. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis secara deskriptif terkait evaluasi Program Keluarga Harapan pada komponen pendidikan di Desa Sidorejo dengan menggunakan kriteria evaluasi milik Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis naratif. Pengumpulan data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan subjek penelitian Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Desa Sidorejo, dan Keluarga Penerima Manfaat komponen pendidikan di Desa Sidorejo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi Program Keluarga Harapan pada komponen pendidikan di Desa Sidorejo telah efektif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta efisien dan responsif dalam mengatasi permasalahan KPM. Namun, penelitian ini mengidentifikasi beberapa hambatan dalam pelaksanaan PKH komponen pendidikan di Desa Sidorejo yaitu verifikasi data yang belum optimal, penyaluran dana bantuan yang tidak merata, dan ketidaktepatan penggunaan dana. Saran yang diberikan adalah 1) Pemerintah Desa Sidorejo perlu melakukan validasi data KPM, 2) Kementerian Sosial perlu meningkatkan alokasi dana bantuan, 3) Pemerintah Desa Sidorejo dan Pendamping PKH perlu melakukan pendataan anak usia sekolah, dan 4) Pendamping PKH perlu meningkatkan pengawasan terhadap KPM.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, PKH, Komponen Pendidikan

Abstract

The Family Hope Program is a conditional non-cash transfer that aims to alleviate poverty in Indonesia. Sidorejo Village, Krian Sub-district has received PKH assistance since 2007, this research is intended to evaluate the implementation of the Family Hope Program in the education component in Sidorejo Village. The purpose of this study is to descriptively analyze the evaluation of the Family Hope Program on the education component in Sidorejo Village using Dunn's evaluation criteria which include effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. This research uses a qualitative approach with narrative analysis techniques. Data were collected through observation, documentation, and interviews with research subjects from the Sidoarjo Regency Social Service, Sidorejo Village Government, and Beneficiary Families of the education component in Sidorejo Village. The results show that the evaluation of the Family Hope Program in the education component in Sidorejo Village has been effective in improving the community's standard of living, as well as efficient and responsive in overcoming KPM problems. However, this study identified several obstacles in the implementation of the PKH education component in Sidorejo Village, namely data verification that has not been optimized, uneven distribution of aid funds, and inaccurate use of funds. The suggestions given are 1) The Sidorejo Village Government needs to validate KPM data, 2) The Ministry of Social Affairs needs to increase the allocation of aid funds, 3) The Sidorejo Village Government and PKH Facilitators need to collect data on school-age children, and 4) PKH Facilitators need to increase supervision of KPM.

Keywords: Policy Evaluation, PKH, Education Component

PENDAHULUAN

Pendidikan memegang peran penting dalam memajukan pengetahuan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Pilar keempat dari tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu "Pendidikan Berkualitas," bertujuan untuk memastikan pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan peluang belajar sepanjang hayat bagi semua orang (Bappenas, 2023). Pendidikan merupakan komponen krusial dalam membantu pemerintah terus menyediakan layanan berkualitas di Indonesia (Savitri & Rahaju, 2021). Kemendikbud menyatakan bahwa pada tahun ajaran 2020/2021, Jawa Timur menempati peringkat keempat terbanyak jumlah siswa putus sekolah di Indonesia pada jenjang Sekolah Dasar (SD), dengan total 3.436 anak (Kemendikbud, 2021). Menurut badan pusat statistik angka partisipasi murni di Kabupaten Sidoarjo tahun 2023 pada jenjang pendidikan sekolah dasar mencapai 93,53%, pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurun menjadi 89,04%, pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) serapan semakin menurun menjadi 84,23%. Terdapat dua penyebab turunnya angka partisipasi murni di setiap jenjang pendidikan, yaitu ketidaksesuaian usia siswa dengan tingkat pendidikan yang diambil dan keputusan siswa untuk keluar atau putus sekolah (BPS, 2023).

Permasalahan putus sekolah pada anak disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup fasilitas pendidikan yang tersedia dan metode pendidikan yang digunakan. Faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi dan sosial, seperti tingkat pendidikan orang tua, keterbukaan masyarakat terhadap pengetahuan, status sosial, lokasi tempat tinggal yang jauh dari kota, beban tanggungan keluarga, dan kemiskinan (Bidari & Budiantara, 2020). Selain itu, ketidakmerataan dalam distribusi bantuan kepada masyarakat kurang mampu, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Program Keluarga Harapan (PKH) di bidang pendidikan, juga menjadi faktor yang menyebabkan anak-anak putus sekolah (Hakim, 2020).

Program Keluarga Harapan adalah program pemerintah yang memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga pra-sejahtera dan rentan yang tercatat dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan diakui sebagai keluarga penerima manfaat. PKH bertujuan untuk

memungkinkan keluarga penerima manfaat mengakses fasilitas dan layanan yang tersedia di sekitar tempat tinggal mereka serta mempertahankan kesejahteraan sosial. PKH memiliki tiga komponen penerima bantuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 yaitu komponen kesehatan, komponen pendidikan, dan komponen kesejahteraan sosial.

Pada tahun 2021 terdapat 37.418 keluarga penerima manfaat di Kabupaten Sidoarjo (DISKOMINFO Kabupaten Sidoarjo, 2022). Bantuan dari Program Keluarga Harapan telah diterima oleh Kabupaten Sidoarjo sejak peluncuran awal program pada tahun 2007.

Desa Sidorejo merupakan salah satu dari banyaknya desa di Kecamatan Krian yang mendapatkan bantuan PKH. Jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan pada tahun 2023 mencapai 92 KPM dengan rincian sebagai berikut yang diklasifikasikan berdasarkan penerima bantuan PKH masing-masing dusun.

Tabel 1 Rincian Penerima PKH di Desa Sidorejo Tahun 2023

Komponen	Jumlah
Pendidikan	34
Kesejahteraan Sosial	49
Kesehatan	9
Total	92

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, 2023.

Penelitian ini berfokus pada komponen pertama PKH yaitu komponen pendidikan. Masih tingginya angka anak putus sekolah terutama pada tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas membuat pemerintah memberikan perhatian lebih terkait permasalahan tersebut (Pedoman Pelaksanaan PKH, 2021). Pendidikan dalam keluarga adalah proses yang berlangsung secara berkesinambungan dalam membentuk mental dan tingkah laku seorang anak. Anak-anak belajar lebih banyak dalam keluarga daripada di sekolah. Dengan demikian, diharapkan bahwa PKH akan membantu meningkatkan partisipasi wajib belajar anak (Ardiyanto & Prabawati, 2021).

Pelaksanaan PKH di Desa Sidorejo diawali dengan keluarga miskin/pra-sejahtera atau dapat disebut dengan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) harus sudah terdaftar di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Setelah warga terdaftar akan diperiksa oleh operator kesejahteraan dari desa untuk seleksi berdasarkan

kriteria penerima bantuan PKH. Proses pemeriksaan warga yang lolos seleksi akan menghasilkan output berupa surat rekomendasi oleh operator desa dengan persetujuan warga tersebut lalu diajukan ke Dinas Sosial untuk disetujui sebagai calon penerima manfaat. Jika surat rekomendasi sudah mendapatkan persetujuan dari Dinas Sosial maka calon penerima manfaat sudah bisa mendapatkan bantuan dari Program Keluarga Sejahtera.

Penerima PKH secara otomatis memiliki akses ke semua bantuan yang disediakan oleh program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Dengan demikian, penerima PKH dapat mengakses berbagai manfaat, seperti bantuan pangan, pendidikan, layanan kesehatan, dan mendukung upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan memerangi kemiskinan.

Keistimewaan dari PKH terletak pada fokus pemberian bantuan kepada ibu rumah tangga atau perempuan dewasa seperti nenek, bibi, atau kakak perempuan (Ardiyanto & Prabawati, 2021), dengan harapan bahwa ibu tersebut dapat efektif mengelola kebutuhan keluarga agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. KPM mendapat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dapat digunakan sebagai alat penyaluran dana bantuan PKH dan bukti sebagai Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (Kustatiria & Prabawati, 2023).



Gambar 1 Kartu Keluarga Sejahtera

Sumber : Dokumentasi peneliti, 2024

Pada tahun 2023 pencairan dana PKH dipercepat penyalurannya agar bantuan dapat segera diterima oleh KPM yang pada awal pencairan setiap tiga bulan sekali saat ini menjadi dua bulan sekali (Elviza, 2023). KPM akan diberi informasi terkait pencairan dana bantuan PKH oleh pendamping PKH melalui WhatsApp Group. Pembentukan WhatsApp Group berfungsi untuk memudahkan koordinasi antara KPM dengan pendamping PKH. Selain menerima dana bantuan, KPM juga memiliki kegiatan untuk meningkatkan kemampuan.

Tabel 2 Sebaran Penerima PKH Komponen Pendidikan di Setiap Dusun Desa Sidorejo

No	Dusun	Rincian Jenjang Sekolah KPM	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
1	Bendo Munggal	1 KPM SMP	1
2	Dukuh Bareng	1 KPM SD 2 KPM SMP	2
3	Semampir	2 KPM SD 2 KPM SMP 1 KPM SMA	5
4	Sidorame	1 KPM SMP 2 KPM SMA	3
5	Sidorenggo	4 KPM SMP 3 KPM SMA	7
6	Madubronto	1 KPM SD 6 KPM SMP 3 KPM SMA	10
7	Sidorejo	1 KPM SD 3 KPM SMP 1 KPM SMA	5
TOTAL			34

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, 2023.

Berdasarkan tabel di atas jumlah KPM komponen pendidikan sebanyak 34 penerima. Penerima PKH pada komponen pendidikan hanya 37% dari total keseluruhan penerima PKH. Proporsi ini terbilang kecil, menunjukkan bahwa Desa Sidorejo masih memerlukan perbaikan pada aspek pendidikan bagi para penerima PKH yaitu antara lain adalah terkait koordinasi antara pendamping PKH dengan pihak sekolah. Ketidakesesuaian data antara Dapodik dan DTKS menjadi permasalahan utama yang sering muncul, sehingga banyak anak sekolah yang tidak tercakup PKH. Kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh oleh Kementerian: Ketenagakerjaan, Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kesehatan menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Sasmito & Nawangsari, 2019). Selain itu, sulitnya koordinasi dengan pihak sekolah karena beberapa sekolah kurang memahami terkait regulasi siswa yang menerima bantuan PKH. Dengan adanya bantuan

dari pemerintah yaitu PKH dapat memberikan manfaat yang sangat signifikan bagi KPM. Akan tetapi, KPM di desa Sidorejo merasa bantuan yang diterima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sekolah. KPM merasa dana bantuan kurang karena bantuan cair setiap dua bulan sekali dengan nominal yang terbilang kecil untuk memenuhi kebutuhan sekolah

Dengan adanya PKH dapat memberikan manfaat yang sangat signifikan bagi keluarga penerima manfaat. Dana bantuan seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder KPM seperti pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Namun, karena pendamping dan operator PKH hanya mengarahkan warga untuk menggunakan dana bantuan sesuai anjuran Dinas Sosial, pendamping dan operator tidak tahu apakah bantuan tersebut digunakan dengan semestinya atau tidak. Permasalahan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Febrianti dan Utami (2021) yang menyatakan bahwa masih banyak KPM yang menyalahgunakan dana bantuan PKH untuk membeli kebutuhan tersier.

Tantangan lain yang dihadapi adalah orang tua anak yang tidak paham terkait batasan umur penerima bantuan dan sering menanyakan kepada operator desa mengapa bantuan tidak cair. Sedangkan anak penerima bantuan sudah lulus sekolah atau sudah selesai dalam menempuh pendidikan dan dana bantuan yang tidak kunjung berubah ketika anak sudah naik kelas dari SD ke SMP maupun dari SMP ke SMA.

Dalam hal ini perlu adanya proses evaluasi kebijakan untuk dapat terus memperbaiki dan meningkatkan PKH agar dapat mencapai tujuan program. Evaluasi adalah tahap akhir dalam proses kebijakan publik. Evaluasi kebijakan bertujuan untuk menilai konsekuensi suatu program atau kebijakan terhadap masyarakat dengan membandingkan kondisi sebelum dan setelah penerapan program tersebut. Dalam proses evaluasi, penetapan kriteria diperlukan untuk menilai efektivitas program tersebut (Anggara, 2018). Terdapat enam indikator kriteria evaluasi kebijakan menurut William N Dunn (2003) yaitu:

1. Efektivitas

Efektivitas adalah indikator yang menyoroti seberapa jauh suatu tindakan atau kebijakan mampu mencapai hasil yang diharapkan dan sejauh mana tujuan tersebut dapat dicapai (Dunn, 2003).

2. Efisiensi

Efisiensi adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana upaya yang dilakukan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efisiensi menjadi faktor penting dalam menilai sejauh mana suatu aktivitas dapat mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan mencapai hasil yang maksimal tanpa pemborosan (Dunn, 2003).

3. Kecukupan

Kecukupan dalam evaluasi merujuk pada penilaian terhadap pencapaian target, mengukur sejauh mana kesuksesan dianggap memadai dalam berbagai dimensi (Dunn, 2003).

4. Perataan

Perataan merupakan penilaian terhadap seimbangannya distribusi sumber daya dan potensi manfaat yang dapat terjadi di berbagai lapisan masyarakat (Dunn, 2003).

5. Responsivitas

Responsivitas mengevaluasi sejauh mana kebijakan publik dapat memenuhi kebutuhan, harapan, dan kepentingan para penerima kebijakan. Respon dari sasaran kebijakan menjadi indikator utama untuk menilai apakah kebijakan yang telah diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, atau apakah perbaikan dan penyesuaian diperlukan (Dunn, 2003).

6. Ketepatan

Ketepatan dalam evaluasi kebijakan merujuk pada penilaian terhadap efektivitas kebijakan tersebut, terutama sejauh mana kebijakan itu berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Dunn, 2003).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat isu mengenai program PKH yang berfokus pada evaluasi terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan pada komponen pendidikan terutama di Desa Sidorejo. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul "Evaluasi Program Keluarga Harapan pada Komponen Pendidikan di Desa Sidorejo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo" yang bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi PKH pada komponen pendidikan di Desa Sidorejo.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini memilih pendekatan

kualitatif karena bertujuan untuk memberikan gambaran konkret tentang peristiwa di lapangan, khususnya untuk menjelaskan mendeskripsikan Evaluasi Program Keluarga Harapan pada Komponen Pendidikan di Desa Sidorejo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Lokasi penelitian yang dilakukan, peneliti mengambil data secara administratif di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Fokus penelitian ini yaitu membahas mengenai evaluasi Program Keluarga Harapan pada komponen pendidikan di Desa Sidorejo Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo menggunakan enam indikator kriteria evaluasi kebijakan publik milik William N Dunn (2003) yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Subjek penelitian pada penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purposive sample. Peneliti memilih teknik purposive sample karena teknik tersebut tepat dilakukan pada penelitian ini karena fokus peneliti mencari informan. Untuk itu, subjek penelitian atau informan pada penelitian ini yaitu:

1. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo yaitu pendamping PKH sebagai koordinator antara pemerintah dengan keluarga penerima manfaat terkait Program Keluarga Harapan di Desa Sidorejo.
2. Pemerintah Desa Sidoarjo yaitu Kasi Kesejahteraan Desa Sidorejo sebagai operator desa yang mendaftarkan keluarga miskin untuk mendapatkan bantuan sosial.
3. Keluarga Penerima Manfaat komponen pendidikan di Desa Sidorejo sebagai keluarga penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan yaitu:
 - a. Penerima PKH Komponen Pendidikan Ibu Ngateni dengan satu anak usia sekolah 17 tahun kelas 2 SMA.
 - b. Penerima PKH Komponen Pendidikan Ibu Nur Imamah dengan dua anak usia sekolah 17 tahun kelas 2 SMA.
 - c. Penerima PKH Komponen Pendidikan Ibu Muarika dengan satu anak usia sekolah 12 tahun kelas 1 SMP.
 - d. Penerima PKH Komponen Pendidikan Ibu Sri dengan satu anak usia 6 tahun kelas 1 SMA.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer berupa observasi dan wawancara dan sumber data sekunder berupa buku-

buku, jurnal, maupun arsip berkaitan dengan PKH. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model analisis data milik Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2019) dengan empat tahapan yaitu pengumpulan data terkait penelitian yang dilakukan, reduksi data, penyajian data setelah direduksi, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan publik bertujuan untuk menghasilkan hasil tertentu yang diinginkan oleh masyarakat sebagai konstituen pemerintah (Anggara, 2018:36). Salah satu inisiatif kebijakan yang diluncurkan oleh pemerintah adalah Program Keluarga Harapan, yang dirancang khusus untuk memberikan dukungan kepada keluarga-keluarga yang hidup dalam kondisi ekonomi yang kurang mampu. Tujuan dari program ini salah satunya adalah untuk memberikan bantuan finansial kepada keluarga-keluarga miskin guna memastikan bahwa anak-anak mereka dapat mengakses pendidikan dengan lebih baik, serta untuk meningkatkan tingkat angka partisipasi sekolah.

Evaluasi kebijakan merupakan tahapan terakhir dalam proses kebijakan. Menurut Charles O. Jones, sebagaimana dikutip oleh Ekowati (2009), evaluasi merupakan suatu kegiatan yang memiliki nilai besar dalam memberikan pemahaman dan juga dapat berkontribusi pada penyempurnaan pelaksanaan kebijakan serta pemahaman perkembangannya.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan kriteria evaluasi yang disusun berdasarkan kriteria evaluasi menurut William N. Dunn dan dipertimbangkan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 dan Pedoman Pelaksanaan PKH tahun 2021. Kriteria-kriteria tersebut meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan sebagai berikut:

1. Efektivitas

Berdasarkan hasil data wawancara yang diperoleh mengindikasikan bahwa tujuan PKH adalah mengurangi dan menekan angka kemiskinan serta memungkinkan KPM untuk menjadi mandiri tanpa bergantung pada bantuan dari pemerintah, dan juga untuk memastikan bahwa anak-anak dari keluarga penerima manfaat dapat menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMA. PKH

memberikan bantuan kepada masyarakat yang berada di lapisan pra-sejahtera dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup mereka.. berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tujuan PKH di Desa Sidorejo yang saat ini dijalankan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 mengenai Program Keluarga Harapan. Tujuan PKH tersebut adalah:

- a. Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga.
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan sosial.
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan..
- e. Mengembalikan manfaat produk jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

Sasaran dari PKH merupakan masyarakat tidak mampu atau masyarakat pra sejahtera sesuai dengan kriteria komponen-komponen yang ada dalam PKH. Untuk dapat menjadi target sasaran atau calon keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan data masyarakat pra sejahtera harus sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Adapun kriteria dari Program Keluarga Harapan pada komponen pendidikan adalah anak usia sekolah 6-21 tahun dengan presentase kehadiran di sekolah minimal 85%. Efektivitas menggambarkan seberapa baik suatu usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sementara manfaat merujuk pada hasil positif yang diperoleh dari usaha tersebut. Dengan kata lain, semakin efektif suatu proses, semakin besar manfaat yang dapat dihasilkan dari pelaksanaannya. Hasil wawancara dengan KPM menunjukkan bahwa mereka merasakan manfaat dari bantuan Program Keluarga Harapan. Mereka sangat terbantu dengan dana bantuan PKH untuk mendukung biaya pendidikan anak-anak mereka. Selain itu, KPM komponen

pendidikan juga mendapatkan bantuan dari Program Indonesia Pintar (PIP) dan beasiswa dari sekolah. Namun, masih terdapat KPM yang belum mendapatkan PIP dan masih dalam proses pengajuan pada tahun ini.

Berdasarkan temuan peneliti secara keseluruhan efektivitas pelaksanaan PKH pada komponen pendidikan di Desa Sidorejo dengan beberapa hambatan yang terjadi di lapangan sudah terbilang cukup efektif. Pemerintah desa dan pendamping PKH mengusahakan untuk membantu dalam menyelesaikan hambatan tersebut. Dengan adanya Program Keluarga Harapan pada komponen pendidikan dapat meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga penerima manfaat sehingga mereka memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan hingga jenjang menengah atas.

2. Efisiensi

Efisiensi dalam pelaksanaan PKH peneliti mendefinisikan dalam hal penggunaan sumber daya secara optimal dan keterjangkauan informasi keluarga penerima manfaat terkait Program Keluarga Harapan. Berikut sumber daya manusia dalam pelaksanaan PKH di Desa Sidorejo:

- a. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dan Tim Koordinasi Kabupaten di bawah kepemimpinan Kepala Bidang Urusan Bantuan dan Jaminan Sosial memiliki tanggung jawab dalam menyediakan informasi dan mengadakan sosialisasi, melakukan pengawasan, supervisi, dan pembinaan, mengatasi tantangan yang terkait dengan Program Keluarga Harapan (PKH), membangun kemitraan, serta memberikan laporan pelaksanaan PKH kepada pihak provinsi.
- b. Pendamping PKH tersebar di semua kecamatan Kabupaten Sidoarjo, bertugas untuk memberikan pendampingan kepada keluarga penerima manfaat.
- c. Koordinator Kecamatan di setiap kecamatan, yang juga bertugas sebagai pendamping PKH, memiliki tanggung jawab untuk berkoordinasi dengan camat dan melaporkan pelaksanaan PKH kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- d. Kasi Kesejahteraan bertugas sebagai operator desa dalam menginput data,

verifikasi data, pengajuan data, dan penghapusan di SIKS-NG atau DTKS.

- e. Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) yang bertugas untuk membantu operator desa memberikan informasi kepada masyarakat atau keluarga penerima manfaat terkait Program Keluarga Harapan.

Selain personel atau sumber daya manusia, Program Keluarga Harapan memiliki alokasi anggaran bantuan yang telah ditetapkan untuk keluarga penerima manfaat. Anggaran bantuan yang dialokasikan oleh Kementerian Sosial pada komponen pendidikan disesuaikan dengan tingkatan jenjang pendidikan dengan rincian per tahun untuk Sekolah Dasar sebesar Rp. 900.000, untuk Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp. 1.500.000, untuk Sekolah Menengah Atas sebesar Rp. 2.000.000.

Pencairan dana bantuan Program Keluarga Harapan yang pada awalnya tiga bulan sekali saat ini dipercepat menjadi dua bulan sekali dengan total enam tahapan pencarian yaitu tahap 1 bulan Januari-Februari, tahap 2 bulan Maret-April, tahap 3 bulan Mei-Juni, tahap 4 bulan Juli-Agustus, tahap 5 bulan September-Oktober, dan tahap 6 bulan November-Desember. Dana bantuan dikirimkan dari pusat langsung melalui Kartu Keluarga Sejahtera atau ATM BNI keluarga penerima manfaat dan dapat ditarik melalui Bank BNI, kantor pos, dan agen. Informasi pencairan dilakukan oleh pendamping PKH melalui WhatsApp Group penerima Program Keluarga Harapan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga penerima manfaat Ibu Sri Rahayu menyatakan bahwa penyebaran informasi terkait Program Keluarga Harapan tidak ada masalah dan mudah karena hanya melalui media komunikasi. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan dari Ibu Ngateni selaku keluarga penerima manfaat sekaligus ketua kelompok keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan menyatakan bahwa informasi terkait Program Keluarga Harapan diberikan oleh Pak Habib selaku pendamping PKH melalui WhatsApp dan ketua kelompok.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi efisiensi Program Keluarga Harapan

di Desa Sidorejo menunjukkan kinerja yang baik. Pemanfaatan sumber daya manusia, alokasi anggaran, dan akses informasi terkait program berjalan dengan efisien. KPM dapat dengan mudah mengakses informasi tentang program ini. SDM yang terlibat juga telah melaksanakan tugas mereka dengan baik, memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Sidorejo efisien dalam mencapai tujuan program dan memberikan manfaat bagi keluarga penerima manfaat.

3. Kecukupan

Kecukupan merupakan seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dalam memecahkan masalah (Dunn, 2003). Dalam penelitian ini kecukupan diukur berdasarkan kecukupan dana bantuan yang diterima oleh KPM. Keluarga penerima manfaat merasakan bahwa dana bantuan Program Keluarga Harapan masih belum mencukupi untuk memenuhi sepenuhnya kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Dana bantuan dari PKH masih belum mencukupi untuk menutupi berbagai biaya pendidikan untuk KPM yang bersekolah di lembaga pendidikan swasta. Biaya tersebut meliputi biaya SPP, biaya daftar ulang, dan biaya ujian setiap semester. Dana bantuan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sekolah seperti buku tulis, alat tulis, tas sekolah, dan sepatu sekolah.

Meskipun demikian, kesadaran yang dimiliki oleh keluarga penerima manfaat terhadap dana bantuan yang mereka terima dari Program Keluarga Harapan membuat mereka berupaya untuk mengelola dana bantuan dengan bijak dan efisien. Dengan kesadaran ini, keluarga penerima manfaat berusaha untuk mencukupi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka dengan memanfaatkan dana bantuan tersebut secara optimal. Hal ini mencerminkan sikap tanggap dan bertanggung jawab dari penerima manfaat terhadap bantuan yang mereka terima, serta komitmen mereka untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara produktif demi meningkatkan kualitas hidup dan masa depan anak-anak mereka.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti

secara keseluruhan kecukupan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan pada komponen pendidikan di Desa Sidorejo Kecamatan Krian Kabupaten masih menghadapi tantangan dalam hal kecukupan dana bantuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak keluarga penerima manfaat, terutama bagi mereka yang bersekolah di lembaga pendidikan swasta. Meskipun program ini telah memberikan manfaat yang signifikan bagi sebagian besar penerima manfaat dalam membiayai kebutuhan pendidikan anak-anak mereka di sekolah negeri, masih terdapat kesenjangan yang perlu diperhatikan, terutama dalam mendukung biaya pendidikan anak-anak yang bersekolah di lembaga pendidikan swasta.

4. Perataan

Perataan merujuk pada pendistribusian biaya dan manfaat program yang merata pada kelompok penerima untuk memastikan bahwa manfaat program telah didistribusikan secara adil dan seimbang sehingga tidak ada kelompok yang terlalu diuntungkan atau dirugikan secara tidak adil (Dunn, 2003).

Peneliti mengukur pemerataan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan pada komponen pendidikan di Desa Sidorejo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dengan berdasarkan pada pemerataan wilayah penerima bantuan, pemerataan penerima bantuan, dan pemerataan penyaluran dana bantuan.

Penyebaran penerima bantuan Program Keluarga Harapan pada komponen pendidikan telah mencakup seluruh RT di desa Sidorejo. Meskipun demikian, karena beberapa dusun memiliki wilayah yang lebih luas, maka secara otomatis jumlah keluarga penerima manfaat di dusun-dusun tersebut juga lebih banyak. Tidak ada strategi khusus yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sidorejo dalam memastikan pemerataan penerima PKH pada komponen pendidikan. Pemerintah desa hanya berkoordinasi dengan masyarakat untuk memastikan agar seluruh anak usia sekolah di Desa Sidorejo yang memenuhi kriteria dan membutuhkan dapat diberikan PKH.

Pemerataan penerimaan dana bantuan PKH pada komponen pendidikan di Desa Sidorejo masih menjadi tantangan yang harus

diatasi sepenuhnya. Menurut KPM masih terdapat tetangganya yang belum mendapatkan bantuan dari PKH, sedangkan keluarga tersebut menghadapi situasi ekonomi yang sangat sulit, karena kepala keluarganya mengalami stroke yang menghalangi kemampuannya untuk bekerja dan mencari penghasilan. Kondisi ini menjadikan mereka tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka.

Penyaluran dana bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Sidorejo telah diatur sesuai dengan komponen-komponen yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk masing-masing keluarga penerima manfaat. Namun, belakangan ini, terjadi ketidaksesuaian antara penyaluran bantuan dengan komponen yang seharusnya diterima oleh keluarga penerima manfaat. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa data PKH belakangan ini mengalami ketidakberesan, menyebabkan sejumlah keluarga penerima manfaat tidak menerima bantuan sesuai dengan komponen yang seharusnya mereka dapatkan. Meskipun telah dilaporkan kepada pihak terkait, hingga saat ini belum ada tindak lanjut yang jelas terkait permasalahan ini.

Berdasarkan hasil temuan peneliti evaluasi terkait pemerataan bantuan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan pada komponen pendidikan di Desa Sidorejo sudah cukup merata. Dalam segi pemerataan penerimaan wilayah di seluruh dusun dan perumahan sudah merata, hanya saja untuk pemerataan penerima bantuan masih belum cukup merata karena masih ada anak usia sekolah yang belum tercakup dalam Program Keluarga Harapan, tetapi pemerintah Desa Sidorejo berupaya dengan mendata anak usia sekolah yang membutuhkan dan memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan dengan cara berkoordinasi dengan masyarakat. Meskipun penyaluran dana bantuan telah dilakukan secara merata sesuai dengan komponen yang diterima, masih terdapat hambatan terkait penyaluran yang tidak sesuai dengan komponen yang seharusnya diterima oleh beberapa keluarga penerima manfaat.

5. Responsivitas

Responsivitas merujuk pada kepuasan

kelompok tertentu terhadap hasil kebijakan yang telah dibuat (Dunn, 2003). Responsivitas dalam pelaksanaan PKH pada komponen pendidikan di Desa Sidorejo peneliti mendefinisikan dalam hal kepuasan keluarga penerima manfaat dengan adanya bantuan PKH, kepuasan keluarga penerima manfaat terhadap respon pendamping, dan kecepatan dalam menangani keluhan oleh pendamping PKH.

Berdasarkan hasil wawancara dengan KPM terkait kepuasan terhadap bantuan PKH pada komponen pendidikan di Desa Sidorejo. KPM merasa puas dan sangat terbantu dengan adanya bantuan PKH. KPM menyatakan bahwa bantuan yang diterima memberikan dampak yang baik. Selain itu, KPM juga menyatakan bahwa bantuan PKH membantu mengurangi beban ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka.

Berdasarkan hasil wawancara terkait pengajuan keluhan, sebagian besar keluarga penerima manfaat tidak pernah mengajukan keluhan kepada pendamping PKH. Beberapa KPM yang mengajukan keluhan kepada pendamping PKH menyatakan bahwa respon pendamping PKH sangat baik dan responsif. Keluhan segera ditindaklanjuti oleh pendamping PKH setelah menerima keluhan dari KPM. KPM juga menyatakan bahwa respon pendamping PKH selalu cepat dan tanggap.

Kegiatan sosialisasi terkait Program Keluarga Harapan di Desa Sidorejo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dilakukan tidak menentu. Berdasarkan hasil wawancara sosialisasi terkait PKH dilakukan pada setiap pertemuan seperti pertemuan RW, pertemuan tingkat perangkat-perangkat desa, dan pertemuan untuk ketua kelompok PKH. Namun, karena sosialisasi hanya untuk ketua kelompok saja banyak KPM yang tidak pernah mengikuti sosialisasi tersebut, sehingga cakupan informasi terkait PKH hanya sebatas dari pertemuan rutin yang dilakukan antara KPM dan pendamping PKH.

Pertemuan yang dimaksud oleh keluarga penerima manfaat adalah kegiatan yang wajib dihadiri oleh keluarga penerima manfaat yaitu kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau yang bisa disebut juga

dengan Family Development Session (FDS). Kegiatan P2K2 merupakan kegiatan pertemuan antara keluarga penerima manfaat dengan pendamping PKH. Dalam kegiatan P2K2 keluarga penerima manfaat mendapatkan pendamping dari pendamping PKH terkait penyaluran dan pencairan dana, serta dalam kegiatan tersebut keluarga penerima manfaat bisa mengajukan keluhan-keluhan yang sering dihadapi selama ini terkait Program Keluarga Harapan kepada pendamping PKH. Selain itu, dalam kegiatan P2K2 keluarga penerima manfaat juga mendapatkan materi-materi edukatif seperti pola hidup sehat, kesehatan gizi anak, pola pengasuhan anak, pendidikan anak, sampai pengelolaan keuangan keluarga. Pemberian materi edukatif dalam kegiatan P2K2 bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman keluarga penerima manfaat mengenai pentingnya kesehatan, pengasuhan dan pendidikan anak, pengelolaan keuangan, perlindungan anak dan kesejahteraan sosial dalam lingkup keluarga, sehingga mendorong terciptanya percepatan perubahan perilaku dari keluarga penerima manfaat. Kegiatan P2K2 dilakukan rutin setiap satu bulan sekali yang berlokasi di rumah keluarga penerima manfaat. Kegiatan pertemuan di Desa Sidorejo dibagi menjadi lima kelompok berdasarkan dusun, dengan satu kelompok beranggotakan 15-20 keluarga penerima manfaat setiap kelompok memiliki ketua kelompok masing-masing.



Gambar 2 Kegiatan P2K2

Sumber : Dokumentasi peneliti, 2024

Berdasarkan pengamatan peneliti, responsivitas dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) pada komponen pendidikan di Desa Sidorejo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo menunjukkan pencapaian yang baik. Keluarga penerima manfaat dari program ini telah mengungkapkan kepuasan mereka terhadap bantuan yang diberikan melalui Program Keluarga Harapan. Lebih lanjut, tanggapan terhadap keluhan dari

keluarga penerima manfaat dilakukan dengan cepat dan tanggap oleh pendamping PKH juga terbilang cepat dan tanggap, hal ini menunjukkan adanya keseriusan dari pendamping PKH dalam menangani permasalahan yang muncul.

6. Ketepatan

Ketepatan dalam konteks program kebijakan menandakan bahwa tujuan yang diinginkan dari program tersebut benar-benar memberikan manfaat yang berguna dan bernilai (Dunn, 2003). Peneliti melihat kriteria ketepatan dari sisi ketepatan sasaran penerima PKH pada komponen pendidikan di Desa Sidorejo, ketepatan penggunaan dana bantuan oleh keluarga penerima manfaat, dan ketepatan waktu pencairan dana.

Kesesuaian sasaran penerima bantuan PKH masih belum optimal. Operator desa memperikarakan bahwa sekitar 70-80% dari penerima bantuan dianggap sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Meskipun demikian, pemerintah Desa Sidorejo terus berupaya untuk meningkatkan akurasi penyaluran, memastikan bahwa bantuan mencapai mereka yang benar-benar membutuhkan sesuai dengan kriteria penerima Program Keluarga Harapan. Dengan demikian, meskipun upaya telah dilakukan, tantangan tetap ada dalam memastikan bahwa bantuan disalurkan dengan tepat sasaran dan efektif sesuai dengan tujuan dari Program Keluarga Harapan. Meskipun belum sepenuhnya tepat sasaran pendamping PKH melakukan pengawasan terhadap keluarga penerima manfaat melalui beberapa cara yaitu kunjungan langsung ke rumah mereka dan partisipasi dalam pertemuan P2K2. Dalam pengawasan ini, pendamping PKH memastikan bahwa mereka secara aktif menghadiri pertemuan P2K2 dan juga memverifikasi penggunaan dana bantuan untuk memastikan kepatuhan dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari wawancara dengan keluarga penerima manfaat, terungkap bahwa dana bantuan yang diterima dari Program Keluarga Harapan, terutama dalam aspek pendidikan, digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sekolah anak-anak mereka. Dana tersebut dialokasikan untuk pembelian

berbagai perlengkapan sekolah, seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan sepatu. Selain itu, keluarga penerima manfaat juga menggunakan dana bantuan tersebut untuk menutupi biaya pendidikan anak-anak mereka, termasuk pembayaran SPP, biaya ujian, dan biaya pendaftaran ulang sekolah. Namun, meskipun demikian, masih ada sebagian keluarga penerima manfaat yang menggunakan dana bantuan dengan cara yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pendidikan anak-anak mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga penerima manfaat terkait ketepatan waktu pencairan, mereka menyatakan bahwa pencairan dana bantuan selalu tepat waktu, yaitu setiap dua bulan sekali tanpa pernah mengalami keterlambatan. Namun, terdapat perbedaan dalam waktu pencairan untuk masing-masing keluarga penerima manfaat. Meskipun dana cair sesuai jadwal, setiap keluarga menerima pencairan pada hari yang berbeda-beda, tidak bersamaan pada waktu yang sama. Hal ini menunjukkan adanya ketepatan waktu dalam pencairan, namun tidak dalam keserentakan penerimaan dana oleh semua keluarga penerima manfaat.

Berdasarkan temuan peneliti terhadap evaluasi kriteria ketepatan terungkap bahwa tingkat ketepatan dalam Program Keluarga Harapan pada komponen pendidikan di Desa Sidorejo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo masih belum mencapai tingkat optimal. Temuan peneliti menunjukkan bahwa masih terdapat keluarga penerima manfaat yang tidak menggunakan dana bantuan dengan benar, serta kesesuaian sasaran program yang masih belum memadai. Hal ini menandakan bahwa upaya untuk mencapai tingkat ketepatan yang diinginkan dalam memastikan bahwa bantuan mencapai mereka yang benar-benar membutuhkannya, masih memerlukan perhatian dan peningkatan lebih lanjut.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan data yang diperoleh terkait dengan Evaluasi Program Keluarga Harapan pada Komponen Pendidikan di Desa Sidorejo Kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo, diketahui bahwa program bantuan PKH bertujuan untuk memutus rantai

kemiskinan. Fokus program ini pada bidang pendidikan adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pendidikan dan meningkatkan partisipasi dalam pendidikan dasar wajib selama sembilan tahun. Hasil penelitian ini dianalisis menggunakan kerangka evaluasi kebijakan yang dikembangkan oleh William N. Dunn, yang mencakup kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan ketepatan.

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan pada komponen di Desa Sidorejo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, dalam hal keefektivitasan Program PKH di Desa Sidorejo terbukti efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, terutama dalam hal mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun, masih ada sedikit hambatan yang perlu diatasi untuk mencapai tingkat efektivitas yang lebih tinggi yakni mengenai proses verifikasi data yang masih menggunakan data lama dan ketersediaan bantuan tambahan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) atau beasiswa.

Dilihat dari kriteria efisiensi, dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan pada Komponen Pendidikan di Desa Sidorejo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo penggunaan sumber daya dinilai efisien. Pengalokasian anggaran dan penempatan personel yang sesuai telah meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan program ini. Sumber daya yang disediakan oleh PKH bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diemban. Keluarga penerima manfaat merasa lebih mudah dalam menerima dan mengakses informasi terkait Program Keluarga Harapan, sehingga komunikasi antara pihak terkait berjalan lebih lancar. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam program tersebut telah berhasil, dengan respon yang positif dari masyarakat penerima manfaat.

Penilaian terhadap kriteria kecukupan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Sidorejo masih belum cukup. Hasil wawancara dengan keluarga penerima manfaat mengungkapkan bahwa dana yang diterima dari program tersebut masih belum mencukupi untuk menutupi biaya pendidikan anak-anak mereka secara keseluruhan. Meskipun demikian, keluarga penerima manfaat tetap memiliki kesadaran yang kuat akan pentingnya menerima bantuan ini, yang mendorong mereka untuk mengelola keuangan secara bijaksana dan memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan pendidikan anak.

Penilaian terhadap kriteria pemerataan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Sidorejo sudah merata. Pemerataan penerima bantuan sudah merata di seluruh dusun dan perumahan. Namun masih terdapat tantangan terkait pemerataan penerima bantuan yang masih belum merata karena masih banyak anak usia sekolah yang membutuhkan bantuan tetapi belum tercakup PKH serta penyaluran dana bantuan yang tidak sesuai dengan komponen yang seharusnya diterima oleh beberapa keluarga penerima manfaat.

Penilaian terhadap kriteria responsivitas dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Sidorejo sudah berjalan dengan baik. PKH di Desa Sidorejo telah menunjukkan responsivitas yang baik terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat, terutama dalam menanggapi keluhan yang diajukan oleh keluarga penerima manfaat. Namun, perlu dilakukan peningkatan dalam hal sosialisasi program untuk memastikan bahwa informasi terkait Program Keluarga Harapan dapat diakses dengan lebih baik oleh masyarakat.

Penilaian terhadap kriteria ketepatan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Sidorejo masih terbilang belum tepat. Masih terdapat keluarga penerima manfaat yang belum menggunakan dana dengan tepat serta penerima bantuan PKH yang masih belum sepenuhnya tepat sasaran. Hal ini menandakan bahwa masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar mencapai dan digunakan dengan tepat oleh keluarga penerima manfaat.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Evaluasi Program Keluarga Harapan pada Komponen Pendidikan di Desa Sidorejo Kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa program ini efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Meskipun demikian, masih ada beberapa hambatan yang perlu diatasi, seperti proses verifikasi data yang belum optimal. Secara keseluruhan, penggunaan sumber daya dalam program ini dinilai sudah efisien. Pemerataan penerima bantuan sudah merata, tetapi masih terdapat tantangan terkait penerima bantuan yang belum merata dan penyaluran dana bantuan yang tidak sesuai. Responsivitas program terhadap kebutuhan masyarakat sudah baik. Selain itu, masih terdapat ketidaktepatan dalam penggunaan dan penyaluran bantuan yang memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai Evaluasi Program Keluarga Harapan pada Komponen Pendidikan di Desa Sidorejo Kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo, peneliti memberikan saran untuk membantu pelaksanaan kebijakan menjalankan Program Keluarga Harapan:

1. Pemerintah Desa Sidorejo perlu melakukan penentuan keluarga penerima manfaat dengan melakukan validasi yang baik terhadap setiap data yang dimilikinya.
2. Kementerian Sosial perlu meningkatkan alokasi dana untuk mencukupi kebutuhan pendidikan anak secara lebih memadai.
3. Pemerintah Desa Sidorejo dan pendamping PKH perlu melakukan pendataan terkait anak usia sekolah yang membutuhkan bantuan di Desa Sidorejo, agar untuk diharapkan untuk kedepannya cakupan penerima Program Keluarga Harapan pada komponen pendidikan lebih banyak lagi.
4. Pendamping PKH perlu melakukan pengawasan lebih terhadap keluarga penerima manfaat dalam penggunaan bantuan, agar bantuan digunakan secara tepat guna tidak untuk yang lain.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam atas dedikasi dan kerja keras yang ditunjukkan dalam penelitian ini. Tanpa bantuan dari semua pihak yang terlibat, penelitian ini tidak akan dapat terwujud. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penelitian ini diantaranya:

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Ibu Indah Prabawati, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing.
3. Ibu Dr. Tjitjik Rahaju, M.Si selaku dosen penguji.
4. Bapak Tauran, S.Sos., M.Soc.Sc selaku dosen penguji.
5. Kedua orang tua yang senantiasa mendukung dan mendoakan peneliti.
6. Seluruh Dosen S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya.
7. Bapak Habib selaku pendamping PKH yang senantiasa membantu peneliti.
8. Bapak Angga selaku Kasi Kesejahteraan dan operator Desa Sidorejo.

9. Teman-teman yang selalu membantu dan memberi dukungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ardiyanto, A. F., & Prabawati, I. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk (Studi pada Bidang Pendidikan). *Publika*, 9(1), 13-24.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi, 2021-2023. [Angka Partisipasi Sekolah \(APS\) Menurut Provinsi - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia \(bps.go.id\)](https://www.bps.go.id/angka-partisipasi-sekolah) (diakses pada 1 Maret 2024).
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2023). Sustainable Development Goals. [GOAL 4 - SDGs Indonesia \(bappenas.go.id\)](https://www.bappenas.go.id/goal-4-sdgs) (diakses pada 1 Maret 2024).
- Bidari, D. R., & Budiantara, I. N. (2020). Pemodelan Faktor yang Mempengaruhi Persentase Anak Putus Sekolah di Jawa Timur Menggunakan Regresi Nonparametrik *Spline Truncated*. *Jurnal Sains dan Seni ITS*, 9(2), 2337-3520.
- BPS Kabupaten Sidoarjo. (2024). *Kabupaten Sidoarjo dalam Angka 2024*. BPS Kabupaten Sidoarjo.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo. (2022). Laporan Akhir Analisa Distribusi dan Pemanfaatan Data Bantuan Sosial Tingkat Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Administrasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ekowati, M. R. L. (2009). *Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan atau Program (Suatu Kebijakan Teoritis dan Praktis)*. Surakarta: Pustaka Cakra Surakarta.
- Elzia, S. (2023). Kabar Baik, Bansos PKH Tahap 5 Cair Lagi, Cek Kartu KKS dan Nama Anda di Sini. <https://jambiindependent.disway.id/read/673702/kabar-baik-bansos-pkh-tahap-5-cair-lagi-cek-kartu-kks-dan-nama-anda-di-sini/30> (diakses pada 29 November 2023).
- Febrianti, Rr. D., & Utami, D. (2021). Pemanfaatan Bantuan PKH Bagi Masyarakat Penerima

- Bantuan di Desa Sidorejo Kabupayen Sidoarjo. *Paradigma*, 10(1).
- Hakim, A. (2020). Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah. *Jurnal Pendidikan*, 21(2), 122-132.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). *Ikhtisar Data Pendidikan Tahun 2020/2021*. Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur. (2017). APK/APM Kemendikbud Jawa Timur. (diakses pada 2 Juni 2024).
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2019). Program Keluarga Harapan. <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh> (diakses pada 24 Maret 2024).
- Pedoman Pelaksanaan PKH, 2021.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.
- Sasmito, C., Nawangsari, E. R. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota Batu. *Journal of Public Sector Innovation*, 3(2), 68-74.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

